

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan perdagangan yang dinamis memaksa perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja keuangan guna mempertahankan daya saing di pasar. Dalam konteks ini, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan struktur kepemilikan menjadi aspek krusial yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan.

Struktur kepemilikan, seperti kepemilikan institusional, manajerial, atau publik, memengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan. Kepemilikan institusional sering dikaitkan dengan pengawasan yang lebih ketat, di sisi lain kepemilikan manajerial berpotensi memberi dorongan kepada pengelola guna memperbaiki kinerja perusahaan. Namun, struktur kepemilikan yang tidak seimbang dapat memicu konflik kepentingan yang merugikan (H Bary, 2020).

Corporate governance dipahami sebagai suatu mekanisme dalam mengatur, mengarahkan, serta mengawasi aktivitas manajemen perusahaan dengan tujuan utama mengoptimalkan nilai perusahaan. Implementasi tata kelola yang baik dilakukan melalui pengelolaan yang berlandaskan pada aturan pokok, yakni keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran. www.ojk.go.id

GCG merupakan aspek sistem pengelolaan dengan maksud supaya perusahaan menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan beretika. Penerapan prinsip GCG secara optimal dapat menumbuhkan kepercayaan dari para investor, mendorong efisiensi dalam operasional, dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Selama periode 2020-2023, kebutuhan akan GCG yang baik semakin meningkat seiring dengan tantangan ekonomi global, pandemi COVID-19, dan volatilitas pasar (I Prananta, 2020).

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 menurun sebagai hasil dari upaya pencegahan melalui *sosial distancing*. Menurut riset yang dikerjakan oleh Iskandar et al. (2020), banyak prediksi ekonomi tentang bagaimana wabah COVID-19 akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi Indonesia. Ini menyebabkan turunnya omzet, kapital, keterbatasan material pokok, dan penundaan distribusi. Pembatasan Skala Besar-Besaran (PSBB) digunakan untuk menilai dampak ini dengan melihat kinerja keuangan. Fungsi kinerja keuangan juga menjadi alat untuk mendapatkan informasi tentang status keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Performansi keuangan badan usaha terkait dapat menunjukkan bayangan kondisi finansial suatu badan usaha, sehingga dapat diamati apa yang kurang dan apa yang sudah dilakukan perusahaan selama jangka waktu tertentu. Menurut Fujianti et al (2020) pengukuran performa keuangan suatu badan usaha bisa diamati melalui dua sisi yakni kinerja pasar dan kinerja laporan keuangan (Mardasari et al., 2021).

Tahun 2020, ditandai dengan pandemi global, memberikan cobaan ekstrem yang menciptakan tekanan ekonomi di seluruh dunia, dan Indonesia bukanlah pengecualian. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana inflasi, sebagai salah satu dampak dari ketidakpastian ekonomi, berinteraksi dengan laba perusahaan perbankan (Anwar et al., 2023; Ferayani & Dewi, 2023; Maharani et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, periode tahun 2020 hingga 2022 menjadi tonggak sejarah yang penuh tantangan, terutama bagi sektor perbankan. Sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, sektor perbankan sering kali menjadi barometer terkini dalam mengukur efek dari perubahan-perubahan makroekonomi.

Dalam industri perbankan Indonesia, terdapat berbagai fenomena yang mencerminkan kompleksitas tata kelola serta praktik operasional lembaga keuangan. Misalnya, kasus hilangnya dana nasabah sebesar Rp1,6 miliar milik Vira Vazria pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sisingamangaraja (Tribunnews, 22 Maret 2022). Selain itu, penetapan Direktur Utama Bank Jambi, Yusak El Halcon, sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi

dalam kasus gagal bayar PT Sunprima Nusantara Pembiayaan turut menyoroti permasalahan integritas di sektor perbankan (Metrojambi, 17 Juni 2022).

Sementara itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) juga berperan secara konstruktif untuk industri perbankan. Sebagai contoh, Bank Danamon menerapkan konsep Knowing Your Employee (KYE) bagi calon karyawan baru sebelum resmi bergabung, sebagai langkah preventif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang (Danamon.co.id, 31 Desember 2020). Sementara itu, Bank BJB menempatkan implementasi GCG sebagai landasan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan sekaligus sebagai pedoman strategis untuk menyelaraskan langkah kewirausahaan dengan kepentingan para pemegang saham (Prakoso, Wijaya, & Safelia, 2022)..

Panduan penerapan pedoman pengelolaan perusahaan sesuai standar dan etis dikerjakan melalui Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yang bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan secara efektif dan berintegritas. Dengan mempertimbangkan tren saat ini, bank harus memastikan bahwa mereka menerapkannya. Regulasi dan kesepakatan yang akan datang didasarkan pada strategi perbankan Indonesia hingga 2025 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana ini mendorong perbankan nasional untuk memperkuat praktik tata kelola, khususnya dalam aspek manajemen risiko serta pengelolaan teknologi digital. Sejak pendirian Bank Indonesia, lembaga perbankan di Indonesia juga telah diarahkan dalam upaya pelaksanaan landasan utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tata kelola korporasi yang sehat sebagai dasar keberlangsungan dan stabilitas sistem keuangan (Hardianti, 2023).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sektor perbankan di Indonesia pada awalnya ditentukan oleh Bank Indonesia lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 pada 30 Januari 2006 mengenai penyelenggaraan GCG pada Bank Umum, yang setelahnya disesuaikan melalui PBI No.8/14/PBI/2006 pada 5 Oktober 2006. Aturan

tersebut diperkuat seiring dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP 30 Mei 2007 mengenai Penyelenggaraan GCG bagi Bank Publik. Selanjutnya, kewenangan pengaturan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada tahun 2016 menetapkan Peraturan OJK (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang sekaligus menggantikan PBI No. 8/4/PBI/2006 dan PBI No. 8/14/PBI/2006. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Konservatif, yang juga merevisi ketentuan sebelumnya dalam SE BI No. 15/15/DPNP. sandbox.lppi.or.id.

Hubungan antara profitabilitas serta pengendalian manajemen perusahaan yang sehat akan ditunjukkan oleh kemajuan performa perusahaan, yang akan memberikan kesan positif bagi investor. Sehingga, kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak uang dapat ditingkatkan oleh perusahaan. Tim mengevaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari penerapan tata kelola perusahaan dapat direalisasikan. Perusahaan dapat menggunakan laporan tahunan sebagai titik awal untuk mengetahui situasi keuangan dengan menganalisis rasio keuangan dan neraca.

Pada periode ini, perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) menghadapi tantangan besar akibat pandemi dan kondisi makroekonomi global. Tekanan terhadap likuiditas, fluktuasi harga saham, dan perubahan preferensi investor menjadi tantangan yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan (F Hardianti SSE, 2023).

Kepemilikan institusional merupakan porsi saham yang dimiliki oleh pemegang eksternal, meliputi institusi, organisasi, ataupun kelompok non-internal perusahaan, berperan penting dalam struktur kepemilikan suatu perusahaan (Widiastuti, Midiastuty, & Sutanta, 2013: 3403). Kepemilikan institusional dipandang memiliki kemampuan untuk memonitor performansi manajemen. Tingginya porsi kepemilikan institusional mendorong peningkatan intensitas pengawasan, dengan demikian mampu mengendalikan perilaku oportunistik

manajer, misalnya tindakan melaporkan laba secara manipulatif demi kepentingan pribadi (Jensen & Meckling, 1976: 372–373). Lebih lanjut, pemantauan yang dilakukan oleh investor institusional diyakini dapat menekan kemungkinan terjadinya praktik manipulasi laporan keuangan oleh manajemen, yang pada akhirnya akan memengaruhi besaran laba yang dilaporkan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi kinerja keuangan perusahaan secara lebih objektif.

Mengawasi kegiatan internal perusahaan, mencakup alur akuntabilitas keuangan, pengelolaan risiko, pelaksanaan audit, serta implementasi landasan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tata kelola korporasi merupakan tugas dari komite audit. Komite audit berperan sebagai penghubung relasi investor dengan dewan komisaris melalui pelaksanaan mekanisme penertiban yang dilakukan oleh dewan pengawas dan dewan pengurus. Kehadiran komite audit diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh dewan pengawas dan dewan pengurus. Mulai dari dewan pengawas lalu dewan pengurus kemudian komite audit jika terdapat kekurangan dalam pengawasan dapat menghambat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara , yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. (Astri Aprianingsih, 2016).

Kinerja keuangan menjadi indikator utama keberhasilan perusahaan. Rasio seperti *Return On Assets* , *Return On Equity* , dan *Net Profit Margin* sering digunakan untuk merefleksikan sejauh mana aset perusahaan mampu memberikan kontribusi terhadap laba bersih dan ekuitas yang dimilikinya. Profitabilitas yang baik biasanya sejalan dengan sistem pengendalian bisnis yang sehat. Keadaan ini bisa terlihat dari meningkatnya kinerja perusahaan juga memberi kesan positif bagi investor. Jadi, peluang perusahaan untuk mendapat keuntungan lebih besar semakin terbuka. Setelahnya, tim mengevaluasi untuk memastikan rencana tata kelola tersebut sudah tercapai. Perusahaan dapat menggunakan laporan tahunan sebagai titik awal untuk mengetahui situasi keuangan dengan menganalisis rasio keuangan dan neraca.

Tugas untuk mengawasi kegiatan internal perusahaan, mencakup alur akuntabilitas keuangan, pengelolaan potensi kerugian, kegiatan audit, juga implementasi tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dimiliki oleh komite audit. Dalam penelitian ini, *Return on Assets* (ROA), yang menjadi fokus utama pembahasan, dipergunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. ROA menggambarkan seberapa baik perusahaan memanfaatkan seluruh properti perusahaan dimanfaatkan seoptimal mungkin guna memperoleh pendapatan setelah dikurangi beban pajak. Semakin efektif penggunaan aset, maka semakin besar laba yang diperoleh dari jumlah aset tertentu, nilai ROA pun semakin tinggi. (<https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-8996-Bab1.pdf>).

Sejumlah paparan mengenai kendala di industri perbankan, Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian GCG yang hanya diproksikan terhadap Kepemilikan Institusional (KI) dan Komite Audit (KA) adalah karena kedua indikator ini dinilai paling relevan dan dominan dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan **Rahmawati, I., & Dewi, P. S. (2020, h. 322 - 336)**. Kepemilikan institusional berperan penting sebagai pengawas eksternal yang dapat menekan terjadinya perbedaan kepentingan antara pengurus perusahaan dengan *shareholder*, sementara komite audit berperan menjaga kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian internal badan usaha **Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976, h. 305 - 360)**. Variabel lain dari GCG seperti kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, atau pengungkapan informasi memang juga penting, tetapi penelitian ini memfokuskan hanya pada KI dan KA agar analisis lebih terarah, spesifik, dan sesuai dengan data yang tersedia di sektor perbankan Indonesia.

Studi ini penting dalam mengidentifikasi keterkaitan pada tatanan kepemilikan, penerapan GCG, dan performansi perusahaan di BEI. Dengan memahami hubungan ini, perusahaan dapat mengadopsi strategi yang lebih efektif guna memperkuat keunggulan kompetitif dan keberlanjutan bisnis di masa depan.

Sehubungan dengan permasalahan yang dikaji, penulis mengangkat penelitian dengan judul "**Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, bisa diuraikan sejumlah persoalan yang menjadi fokus penelitian ini, diantaranya :

1. Tidak semua perusahaan perbankan di BEI menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, sehingga berpotensi mempengaruhi kepercayaan investor dan kinerja keuangan perusahaan perbankan tersebut.
2. Risiko manipulasi laporan keuangan akibat lemahnya pengawasan dari kepemilikan institusional dan komite audit, yang berpotensi menghambat implelementasi *Good Corporate Governance* dan berdampak atas stabilitas keuangan perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjabaran latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan yang dikemukakan adalah apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan perbankan BEI selama periode 2020-2023.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data yang signifikan serta relevan dengan topik yang dibahas, sekaligus memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi Strata Satu pada Jurusan Akuntansi, Universitas Sangga Buana YPKP.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Untuk memberikan bukti bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan perbankan BEI selama periode 2020-2023.

1.5 Kegunaan Teoritis dan Praktis

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Studi ini diantisipasi bisa memperluas literatur akademik, khususnya dalam memahami peran GCG di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, yakni pada periode 2020-2023. Di samping itu penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk menguji variabel lain yang relevan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis ditujukan untuk memberikan kontribusi yang relevan bagi pihak lain yang berkepentingan dalam mengkaji bahasan kepemilikan institusional dan Komite Audit serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pada penelitian mengenai biaya agensi oleh Jensen dan Meckling (1976) menyampaikan adanya hubungan kontraktual antara pengusaha (*principal*) dengan pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan operasional perusahaan (*agent*). Ketika setiap pihak berupaya mengoptimalkan kepentingannya sendiri, terdapat kemungkinan besar sering kali agen bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri, yang tidak selalu searah dengan kepentingan prinsipal. Potensi penyimpangan itu dapat diminimalisasi oleh *principal* melalui pemberian insentif atau kompensasi, sekaligus dengan menanggung tarif pengendalian (*monitoring cost*) yang didesain untuk membendung perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh *agent* dalam aktivitas perusahaan.

"Struktur kepemilikan adalah susunan kepemilikan saham dalam perusahaan yang menentukan sejauh mana pengendalian pemegang saham terhadap manajemen. Struktur ini memengaruhi hubungan keagenan antara manajer dan pemegang saham,

yang berdampak pada pengambilan keputusan strategis perusahaan." (Jensen & Meckling 1976)

Melalui penerapan lima prinsip penting: transparansi, pertanggungjawaban, tanggung jawab, independensi, dan *fairness*, GCG bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan. Penerapan transparansi mengharuskan perusahaan menyediakan informasi yang jelas, penting, dan dapat diakses secara tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Akuntabilitas memastikan bahwa perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas, di mana setiap anggota staf memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas lingkungan dan sosial serta mematuhi hukum dan peraturan. Untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan tetap adil, pengelolaan bisnis yang independen harus dilakukan. Perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingannya secara adil, termasuk karyawan, pemegang saham minoritas, dan masyarakat sekitar. Effendi juga menjelaskan bahwa tujuan implementasi GCG adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan, membangun kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, mengurangi konflik kepentingan, dan menghasilkan nilai tambah jangka panjang. Efek GCG yang efektif mencakup keberlanjutan perusahaan, peningkatan nilai perusahaan melalui persepsi investor yang positif, dan pengelolaan risiko yang lebih baik, termasuk risiko keuangan.

Effendi menekankan bahwa bisnis yang menjalankan GCG secara terus menerus akan memiliki kinerja finansial yang lebih baik, reputasi yang lebih kuat, dan lebih menarik bagi investor. Dengan demikian, GCG menjadi elemen penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global dan mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dalam buku yang berjudul *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, menyatakan bahwa **"Good Corporate Governance (GCG) adalah kumpulan prinsip,**

mekanisme, dan sistem tata kelola perusahaan yang dimaksudkan untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan." (Arif Effendi, 2016).

GCG menekankan lima prinsip dasar dalam praktiknya, yakni keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan perlakuan yang adil meningkatkan keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Mereka menekankan bahwa penerapan GCG yang konsisten dapat mengurangi risiko bisnis, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini sejalan dengan tujuan utama tata kelola yang baik, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, memastikan keberlanjutan perusahaan, dan menciptakan penyelarasan kepentingan antara *shareholder* dan *stakeholder*. **"Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi, secara signifikan memengaruhi persepsi investor, yang berdampak langsung pada nilai perusahaan dan kinerja keuangan." (Sulistiyo & Aryaningsih, 2013).**

Di buku *Managerial Finance*, Weston dan Copeland (1992) menyatakan bahwa **kinerja keuangan perusahaan adalah ukuran keberhasilan manajemen dalam pemanfaatan sumber daya perusahaan secara optimal serta tepat guna.** Ada banyak indikator yang berfungsi sebagai indikator dalam mengukur performa keuangan perusahaan, seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan Tobin's Q. Indikator-indikator ini menunjukkan tingkat pengembalian investasi dan efisiensi operasional perusahaan. Mereka menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk menjaga daya saing dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Menurut Weston dan Copeland, kinerja keuangan yang optimal tergantung pada manajemen yang baik dalam mengelola aset serta struktur kepemilikan, kebijakan pendanaan, dan strategi bisnis yang diterapkan perusahaan. Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan menjadi alat penting untuk menilai profitabilitas dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Dalam artikel mereka yang berjudul *Corporate Governance in Asia: A Survey*, Claessens dan Fan (2002) menyatakan bahwa sistem pengelolaan perusahaan berkinerja baik sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan, terutama di negara-negara Asia yang sering menghadapi masalah seperti kepemilikan terkonsentrasi dan kurangnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Mereka menjelaskan bahwa, meskipun struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki kepemilikan yang terkonsentrasi, struktur kepemilikan terkonsentrasi Mereka juga menekankan bahwa mekanisme tata kelola yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Menurut Claessens dan Fan, penerapan tata kelola yang efektif tidak hanya meningkatkan nilai perusahaan tetapi juga memainkan peran penting. **"Kombinasi antara struktur kepemilikan yang baik dan implementasi GCG yang efektif akan menghasilkan mekanisme kontrol yang kuat untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan."** (Claessens dan Fan, 2002).

GCG dapat dipahami sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan yang menekankan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Penerapan GCG yang baik dapat mengurangi risiko konflik kepentingan dan kecurangan dalam perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) juga dikemukakan oleh **Ardeno Kurniawan (2012:27): "Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan stakeholder-stakeholder lainnya seperti pegawai, kreditor, dan masyarakat"**

Pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dilakukan dengan mengukur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran komite audit. Pengukuran GCG juga dapat dilakukan dengan melihat hak pemegang saham, pengungkapan kepada investor, dan audit internal. *Good Corporate Governance* ditentukan melalui proksi GCG Score, yang terdiri atas beberapa sub-indeks sebagai tolok ukur dalam

proses penilaian. Sub-indeks tersebut mencakup sejumlah indikator utama tata kelola perusahaan yang dijadikan dasar dalam menentukan skor, antara lain :

1. *Shareholder Rights / Hak Pemegang Saham*

Memaparkan variabel-variabel yang dijadikan dasar dalam scoring hak pemegang saham.

2. *Boards of Directors*

Mengenai aspek yang dijadikan acuan untuk mengevaluasi dewan komisaris.

3. *Outside Directors*

Memaparkan variabel-variabel yang dijadikan dasar dalam scoring komisaris independen.

4. *Audit Committee and Internal Auditor*

Menjabarkan faktor yang dijadikan ukuran dalam penilaian komite audit dan audit internal.

5. *Disclosure to Investors*

Menjelaskan variabel yang dijadikan dasar dalam penilaian terhadap pengungkapan kepada investor.

Performansi keuangan termasuk hasil analisis keadaan finansial dari suatu lembaga usaha selama kurun waktu yang ditentukan, baik untuk mengetahui tingkat keberhasilan ataupun untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban serta mencapai tujuan bisnisnya **(Harahap, 2015)**. Dalam konteks perbankan, kinerja keuangan mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola dana pihak ketiga, memberikan kredit, dan menghasilkan laba secara efisien.

Menurut **Jumingan (2014)**, kinerja bank adalah gambaran dari prestasi yang dicapai oleh bank dan operasionalnya dalam bidang keuangan, pemasaran, peghimpunan serta pendanaan, inovasi, dan human capital. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan kinerja seseorang sehingga mereka dapat berada di atas rata-rata. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kinerja keuangan. Menurut **Sofan (2013)**, **rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan laba dari berbagai sumber, termasuk kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan cabang.** *Return on Assets* (ROA) digunakan dalam studi ini, ROA merefleksikan tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset demi menciptakan laba secara optimal. Sementara itu, ROE untuk menilai sejauh mana perusahaan berpotensi menciptakan return ke

euntungan bagi *shareholder* melalui modal yang telah mereka tanam.

1.6.2 Penelitian terdahulu/studi empiris

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fauziah, N., & Basri, Y. Z. (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di BEI	Transparansi berpengaruh signifikan terhadap ROA, dengan nilai t hitung $2,56 > t$ tabel $1,96$ pada tingkat signifikansi 5% (p -value = $0,012$). Hasil regresi dengan nilai koefisien $0,15$ menunjukkan adanya hubungan positif, di mana setiap penambahan satu unit transparansi memberikan kontribusi terhadap peningkatan ROA sebesar 15% Akuntabilitas juga memberikan dampak signifikan pada ROA, dengan t value $2,03 > t$

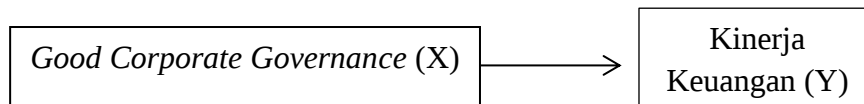
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			tabel 1,96 (p-value = 0,045). Koefisien sebesar 0,10 menunjukkan pengaruh positif meskipun lebih kecil dibanding transparansi. Independensi, meskipun dianalisis, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, dengan t hitung $1,20 < t$ tabel 1,96 (p-value = 0,234).
2.	Mardiana, S., & Putra, I. M. A. (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Selama Pandemi COVID-19. (Bank yang terdaftar di BEI periode 2020-2021)	Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap NIM, dengan nilai t hitung $3,21 > t$ tabel 1,98 pada tingkat signifikansi 5% (p-value = 0,001). Koefisien sebesar 0,18 menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan institusional sebesar 1 satuan dapat meningkatkan NIM hingga 18%. Komite audit juga memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas laba, dengan nilai t hitung $2,01 > t$ tabel 1,98 (p-value = 0,047). Namun, pengaruhnya lebih moderat, dengan koefisien sebesar 0,08, yang berarti peningkatan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			aktivitas komite audit hanya meningkatkan stabilitas laba sebesar 8%.
3.	Putri, A. P., & Firmansyah, A. (2022)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan pada bank yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.	Dewan komisaris independen memberi dampak signifikan pada ROA, dengan nilai t value $2,87 > t$ table $1,97$ pada tingkat signifikansi 5% (p-value = $0,004$). Koefisien sejumlah $0,13$ yang menyatakan keberadaan dewan komisaris independen meningkatkan ROA sebesar 13%. Ukuran komite audit juga signifikan, dengan nilai t hitung $2,05 > t$ tabel $1,97$ (p-value = $0,041$). Koefisien sebesar $0,07$ menunjukkan bahwa komite audit yang lebih besar meningkatkan efektivitas pengawasan hingga 7%.

1.6.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* diidentifikasi sebagai faktor penentu Kinerja Keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip GCG, seperti kepemilikan institusional, efektivitas komite audit berperan dalam meningkatkan kepercayaan investor dan kepatuhan

terhadap regulasi. Dengan implementasi GCG yang optimal, perusahaan diantisipasi mampu menunjang penilaian performansi keuangan lewat *Return on Assets* (ROA) dan indikator lainnya. Dengan demikian, penelitian ini mengasumsikan bahwa lebih optimal implementasi *Good Corporate Governance*, sehingga kian tinggi pula Kinerja Keuangan perusahaan.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

1.6.4 Hipotesis

Hipotesis dapat dipahami sebagai suatu pendapat dugaan di awal sebuah penelitian sebagai pedoman yang mengasumsikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait (Sahir, 2022). Hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih.

Hubungan antara kepemilikan institusional, komite audit, dan ROA (*Return on Assets*) dapat dijelaskan melalui beberapa teori yang telah berkembang dalam literatur akuntansi dan keuangan. Menurut Teori *Stakeholder* (Freeman, 1984), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang kuat cenderung lebih memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk transparansi dalam laporan keuangan yang berujung pada peningkatan ROA. Komite audit yang kuat memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keuangan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan ROA dengan meningkatkan kepercayaan investor.

Hipotesis dari penelitian ini yakni, Implementasi *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

1.7 Lokasi dan Waktu

Lokasi

Studi ini terfokus pada perseroan perbankan yang secara resmi teregistrasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020 hingga 2023, guna menganalisis keterkaitan antara sistem pengendalian perusahaan perbankan serta performansi dalam kurun waktu tertentu.

Waktu

Waktu untuk penelitian ini dimulai dari November 2024 sampai dengan Februari 2025.